



# RUMAH SAKIT BERAU BENAR-BENAR SAKIT

BACA SELENGKAPNYA DI HALAMAN 2

**RSUD Abdul Rivai  
Punya Utang  
Rp36,8 Miliar**

**Belum Beroperasi,  
RSUD Baru  
Banjir Kritik**





# UTANG PULUHAN MILIAR

## Bupati Berau Harus Tegak Copot Manajemen RSUD Abdul Rivai

**D**EWAN Pengawas BLUD RSUD dr Abdul Rivai Berau melakukan evaluasi mendalam terkait capaian keuangan 2025. Dalam rapat tersebut, terungkap kondisi finansial rumah sakit yang cukup mengkhawatirkan. Selain sisa anggaran, beban utang yang sangat besar menjadi poin krusial yang harus segera diselesaikan.

Berdasarkan data laporan keuangan per 31 Desember 2025, RSUD dr Abdul Rivai mencatatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 3.418.169.467,57.

Angka tersebut sejalan dengan jumlah uang kas dan setara kas yang dimiliki rumah sakit pada periode yang sama.

Salah satu sorotan utama dalam rapat tersebut adalah penurunan signifikan jumlah klaim BPJS Kesehatan. Data menunjukkan, dari 80.168 kasus pada 2024, jumlah klaim turun menjadi 66.915 kasus pada 2025.

Penurunan ini disebut terjadi akibat adanya penerapan aturan baru mengenai mekanisme klaim BPJS. Meski jumlah klaim menurun, rumah sakit masih mencatatkan piutang usaha yang cukup besar, yakni mencapai Rp12.047.438.224 per akhir

tahun lalu.

Rincian Beban Utang Operasional

Di sisi lain, manajemen RSUD dr Abdul Rivai juga memaparkan total kewajiban atau hutang rumah sakit yang mencapai Rp36.845.237.378 per 31 Desember 2025.

Komponen utang terbesar bersumber dari pengadaan obat-obatan dan jasa pelayanan (JP).

Tercatat, utang obat mencapai Rp10.483.234.191, di mana sebagian besar merupakan invoice jatuh tempo 2025 sebesar Rp6,5 miliar.

Selain itu, terdapat utang Jasa Pelayanan (JP) dengan total Rp12.674.802.357 yang terdiri dari JP BPJS periode September-Desember 2025 serta JP Cash/Kredit periode Juli-Desember 2025.

Ada pula utang Pajak Jasa Pelayanan sebesar Rp92.041.718.

Beberapa kewajiban lain yang juga menjadi perhatian meliputi:

1. Utang kepada kontraktor sebesar Rp12.283.952.000.
2. Utang biaya operasional seperti tagihan listrik (Rp155 juta), telepon (Rp3,7 juta), serta pengangkutan limbah B3 (Rp381 juta).
3. Utang bahan dan alat laboratorium sebesar Rp

328.063.665.

Meskipun menghadapi beban utang, manajemen melaporkan nilai persediaan rumah sakit masih berada di angka Rp12.940.597.525.

### SOROTAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN

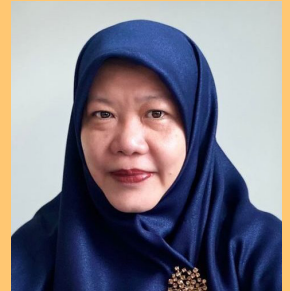
Anggota Dewas RSUD dr Abdul Rivai, Lamlay Sarie, menyebut, kondisi ini dinilai memerlukan perhatian serius serta langkah pembenahan segera dari pihak manajemen.

Ia menyatakan, pihaknya telah menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan sebagaimana mestinya. Hal ini termasuk memberikan catatan serta rekomendasi strategis terkait kondisi kesehatan keuangan rumah sakit agar pelayanan tetap berjalan optimal.

Salah satu poin krusial yang disoroti adalah munculnya utang dalam jumlah besar di tengah adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).

Fenomena ini dianggap sebagai indikator diperlukan evaluasi mendalam terhadap pola pengelolaan keuangan yang selama ini diterapkan oleh manajemen rumah sakit.

"Ini tentu menjadi perhatian. Dewas sudah menyampaikan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh manajemen," ujar Lamlay, Kamis (16/4/2026).



**LAMLAY SARIE**  
Anggota Dewas RSUD  
dr Abdul Rivai



Ini tentu menjadi perhatian. Dewas sudah menyampaikan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh manajemen"

Lamlay menegaskan, Dewas secara rutin melakukan pengawasan, baik melalui pertemuan formal maupun secara tertulis.

Meski demikian, ia mengingatkan, kewenangan penuh untuk mengeksekusi langkah-langkah perbaikan secara teknis tetap berada di tangan manajemen rumah sakit.

Dalam analisisnya, Lamlay juga menyinggung adanya berbagai faktor eksternal yang turut memengaruhi stabilitas keuangan rumah sakit.

**BACA SELINGKAPNYA DI HALAMAN 3**



Beberapa di antaranya adalah tren penurunan klaim BPJS serta berbagai kewajiban operasional rutin yang tetap harus dipenuhi oleh pihak rumah sakit demi menjaga kualitas layanan.

Namun, ia memilih untuk tidak merinci langkah teknis yang akan diambil ke depan, mengingat hal tersebut sepenuhnya masuk ke dalam ranah kebijakan internal manajemen.

“Pengawas itu menyampaikan dan mengingatkan. Untuk pelaksanaan, itu ada di manajemen,” tegasnya.

Sebagai instansi yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), RSUD dr Abdul Rivai memiliki otonomi khusus dalam pengelolaannya.

Hal inilah yang membuat Dewas tidak dapat melakukan intervensi langsung ke dalam ranah operasional harian rumah sakit.

Lamlay menjelaskan, urusan penilaian kinerja pimpinan merupakan wewenang penuh dari pimpinan daerah, bukan dari Dewas.

“Apalagi kalau soal kinerja pimpinan itu yang bisa mengambil keputusan kepala daerah, kami tidak ada wewenang,” ujarnya.

Melalui sorotan ini, Dewas berharap manajemen dapat

segera melakukan evaluasi menyeluruh.

Tujuannya agar kondisi keuangan rumah sakit kembali sehat sehingga pelayanan medis kepada masyarakat Berau tidak mengalami hambatan di masa mendatang.

### KRITIK KERAS DARI DPRD BERAU

Menurut Anggota DPRD Berau, Abdul Waris, besarnya angka tersebut dinilai tidak wajar dan menjadi indikasi serius adanya persoalan dalam pengelolaan rumah sakit milik pemerintah daerah itu.

Pihaknya berencana kembali memanggil manajemen RSUD dr Abdul Rivai, Dewan Pengawas, hingga Dinas Kesehatan Berau untuk meminta penjelasan rinci terkait membengkaknya utang tersebut.

“Insya Allah minggu depan kami panggil lagi. Kami ingin mengonfirmasi dan mengkaji kenapa bisa ada utang sebesar ini,” ujar Waris, Kamis (16/4/2026).

Menurutnya, persoalan utang yang menumpuk ini tidak bisa dianggap sepele. Sebab, rumah sakit merupakan fasilitas vital yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, bahkan berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa manusia.

“Ini tidak boleh main-main. Kalau rumah sakit ko-

laps, siapa yang bertanggung jawab? Kalau layanan lumpuh, bagaimana nasib masyarakat?” tegas Waris.

Waris juga menyoroti kondisi internal rumah sakit yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Meski berstatus sebagai rumah sakit rujukan, ketersediaan obat disebut sempat sangat terbatas, bahkan nyaris kosong.

Tak hanya itu, keterbatasan anggaran juga berdampak pada operasional tenaga medis dan kelengkapan peralatan.

“Sekarang ini manajemen terlihat cukup kacau. Obat terbatas, peralatan medis kurang, tenaga kesehatan tidak bisa bekerja maksimal karena anggaran minim. Dana BLUD habis, sementara mengandalkan APBD juga terbatas,” ungkapnya.

Ia menegaskan, DPRD akan mendalami akar persoalan tersebut, mulai dari kemungkinan kesalahan kebijakan, penerapan SOP yang tidak tepat, hingga dugaan buruknya tata kelola manajemen.

“Kami ingin tahu, ini kesalahan kebijakan, SOP yang salah, atau memang manajemen yang amburadul. Dan yang paling penting, siapa yang harus bertanggung jawab atas kondisi ini,” tegasnya lagi.



**ABDUL WARIS**  
Anggota DPRD Berau

Kami ingin tahu, ini kesalahan kebijakan, SOP yang salah, atau memang manajemen yang amburadul. Dan yang paling penting, siapa yang harus bertanggung jawab atas kondisi ini”

Sebelumnya, pihak RSUD dr Abdul Rivai bersama Dinas Kesehatan Berau telah menggelar rapat kerja untuk membahas persoalan kekurangan obat dan pelayanan kesehatan.

“Perlu ada pendalaman lanjutan untuk memastikan solusi konkret, sekaligus menjamin pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal di tengah tekanan utang yang besar,” pungkasnya. **(DINI DIVA APRILIA/HENDRA IRAWAN)**

# Dilema Rumah Sakit Baru

## Dikepung Masalah Luar dan Dalam

**P**EMERINTAH Kabupaten Berau terus memacu penyelesaian rumah sakit baru di Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur.

Di tengah ekspektasi besar masyarakat, proyek mercusuar ini menghadapi tantangan ganda: pemenuhan standar pelayanan kesehatan dan persoalan pelik mengenai tata ruang di sekitarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Berau, Lamlay Sarie, menegaskan komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan fasilitas medis ini.

Meskipun kapasitas tempat tidur awalnya dikhawatirkan lebih sedikit dibanding RSUD dr Abdul Rivai, peluang pengembangan gedung masih terbuka lebar.

Namun, ia menekankan



**AHMAD RIFAI**

Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau

Ini bukan bangunan lama, tapi baru. Artinya, ada aktivitas yang dibiarkan berjalan tanpa pengawasan”



an, perluasan fasilitas bukan sekadar keputusan sepihak dari instansinya.

“Keputusan besar memerlukan koordinasi lintas sektor bersama Bapelitbang dan DPUPR. Saya tidak bisa memutuskan sendiri,” ujar Lamlay.

Saat ini, fokus utama adalah memastikan kesiapan operasional dasar. Hal ini meliputi verifikasi tenaga medis, alur pelayanan, hingga pemutakhiran sarana prasarana.

Untuk menjamin standar kualitas, Dinas Kesehatan Berau akan menggandeng Pemerintah Provinsi hingga Kementerian Kesehatan dalam proses asesmen perizinan.

### SOROTAN BANGUNAN LIAR

Di tengah persiapan internal, gangguan justru muncul dari luar pagar. Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Ahmad Rifai, melontarkan kritik keras terhadap munculnya bangunan permanen liar di sekitar area rumah sakit.

Keberadaan bangunan tersebut, terutama yang berdiri tepat di depan pintu utama,

dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan pemerintah.

Rifai menyoroti adanya aktivitas pembangunan baru yang terkesan dibiarkan hingga berdiri kokoh dengan fasilitas pendingin ruangan (AC).

Ia memperingatkan bahwa jika tidak segera ditertibkan, bangunan-bangunan ini akan menghambat akses darurat ambulans saat rumah sakit resmi beroperasi pada pertengahan 2026 mendatang.

“Ini bukan bangunan lama, tapi baru. Artinya, ada aktivitas yang dibiarkan berjalan tanpa pengawasan. Persoalan sengketa lahan di kawasan Inhutani harus tuntas sebelum operasional dimulai,” tegas Rifai.

Merespons kritik tersebut, Satpol PP Berau memberikan klarifikasi terkait batasan wewenang mereka. Sekretaris Satpol PP, Risma Rosehan, menjelaskan, bangunan yang disorot tersebut faktanya berdiri di atas lahan milik PT Inhutani, bukan di dalam aset Pemkab seluas 10,1 hektare.

Kondisi ini menciptakan kebuntuan hukum bagi petu-

gas di lapangan. Selama tidak ada permintaan resmi dari PT Inhutani selaku pemilik lahan, Satpol PP tidak dapat melakukan pembongkaran sepihak.

“Personel kami siap, namun kami tidak bisa bergerak sembarangan karena lokasi itu bukan aset pemerintah daerah,” jelas Risma.

Pendekatan humanis juga menjadi pertimbangan penting. Plt Kepala Bidang Tibumtranmas, Dwi Heri Priyono, menambahkan, pihaknya enggan bertindak arogan terhadap masyarakat yang mencari nafkah di sana tanpa dasar hukum yang kuat.

Meski demikian, mediasi akan tetap dibuka jika di kemudian hari aktivitas tersebut terbukti mengganggu ketertiban umum.

Kini, bola panas ada di tangan pemerintah daerah. Publik menanti langkah konkret untuk menjamin akses kesehatan yang steril sekaligus penyelesaian status lahan yang jelas, agar rumah sakit baru ini tidak hanya unggul secara medis, tetapi juga tertib secara estetika dan aksesibilitas.

(ADRIKNI SHOLIKHATI)

# Menjaga Harga saat Lonjakan Biaya

## Untung Tipis demi Jaga Pelanggan

**B**ADAI kenaikan harga bahan baku mulai menghantam sendi-sendi industri rumah tangga di Kabupaten Berau. Mulai dari kedelai, minyak goreng, hingga plastik pembungkus, semuanya kompak merangkak naik.

Kondisi ini memaksa para pelaku usaha kecil memutar otak agar dapur produksi tetap mengepul tanpa harus mengusir pelanggan setia.

Di kawasan Jalan Marsma Iswahyudi, Kelurahan Rinding, pengrajin tahu dan tempe mulai merasakan sesaknya biaya produksi.

Junai, salah seorang pekerja pabrik setempat, mengungkapkan bahwa penyesuaian harga jual menjadi langkah yang tidak terelakkan. Meski demikian, kenaikan tersebut dilakukan dengan sangat hati-hati demi menjaga loyalitas konsumen.

"Untuk harga memang naik, tapi sedikit saja," ujar Junai saat ditemui di lokasi produksi.

Untuk tahu goreng, har-

ga naik tipis Rp100 per butir, sementara tahu putih naik Rp5.000 per ember. Strategi ini terbukti efektif; meski harga berubah, volume penjualan harian yang menghabiskan 15 karung kedelai tetap stabil.

Kondisi lebih pelik dirasakan oleh para pedagang makanan yang sangat bergantung pada minyak goreng. Berdasarkan data nasional per 10 April 2026, harga minyak goreng premium telah menyentuh angka Rp21.578 per liter.

Di Berau, lonjakan ini memicu dilema besar bagi pedagang gorengan seperti Supri, seorang penjual ayam goreng.

Supri mengeluhkan harga satu jeriken minyak 18 liter yang kini melonjak hingga Rp445.000. Meski biaya operasional membengkak drastis, ia memilih tetap bertahan pada harga lama, yakni Rp8.000 per potong ayam.

Baginya, menaikkan harga adalah risiko yang terlalu besar di tengah daya beli masyarakat yang fluktuatif.

"Mau dinaikkan pasti pembelinya kabur. Kalau dinaikkan kita yang bingung, untungnya tipis," keluh Supri.

Ketakutan akan kehilangan pelanggan menjadi alasan utama mengapa banyak pedagang memilih "berkorban" dengan margin keuntungan yang semakin tergerus.

Keresahan senada juga meluncur dari bibir Amin, seorang pedagang sempol. Selain minyak, ia menyoroti lonjakan harga plastik kemasan dan cup yang dianggap sudah tidak masuk akal.

Plastik bening yang semula Rp17.000 per pak kini melompat ke angka Rp23.000. Selisih harga yang sangat mencolok ini membuatnya melontarkan sindiran tajam.

"Kayak bukan naik ya, pindah harga sebetulnya. Kalau naik kan cuma Rp1.000 atau Rp2.000," sindirnya.

Namun, seperti rekan sejawatnya, Amin tetap mematok harga sempolnya Rp1.000 per tusuk demi menjaga perpu-

garan modal tetap lancar.

Fenomena ini menunjukkan daya tahan luar biasa sekaligus kerentanan ekonomi sektor informal di Bumi Batiwakkal.

Para pelaku usaha kini lebih memilih strategi "untung sedikit yang penting lancar" daripada harus gulung tikar karena sepi pembeli.

Sinergi antara kebijakan fiskal daerah dan pengawasan harga pasar sangat dinanti untuk meredam beban yang dipikul para pejuang ekonomi akar rumput ini.

Tanpa langkah konkret dari pemerintah untuk menstabilkan harga komoditas penting seperti kedelai dan minyak, para pedagang kecil hanya bisa pasrah.

Mereka terus berharap agar kenaikan ini segera memenui titik jenuh, sebelum napas usaha mereka benar-benar habis termakan biaya produksi. (ADRIKNI SHOLIKHATI)



# Akhir Drama Pencurian LPG

## Honda Beat dan CCTV Jadi Kunci

**K**ERESAHAN yang menyelimuti warga Tanjung Redeb dan sekitarnya akhirnya menemui titik terang. Misteri hilangnya tabung LPG milik warga satu per satu kini terpecahkan.

Satreskrim Polres Berau berhasil membekuk seorang pria berinisial MR (58) di kediamannya, kawasan Limunjan, Sambaliung.

Penangkapan pada Minggu (12/4/2026) ini mengakhiri aksi panjang sang residivis yang telah tiga kali masuk penjara.

Aksi terakhirnya di Jalan Teuku Umar terekam kamera pengawas. Rekaman tersebut menjadi kunci penting bagi aparat untuk menghentikan petualangan kriminal pria tua ini.

Kasat Reskrim Polres Berau, AKP Jodi Rahman, mengonfirmasi, pelaku kini telah ditahan untuk proses penyelidikan.

"Saat ini pelaku sudah ditahan untuk proses penyelidikan lebih lanjut," ungkapnya, Selasa (14/4/2026).

Teka-Teki Motor Honda



Beat

Kasus ini tergolong unik karena polisi tidak memburu wajah, melainkan kebiasaan. Kanit Pidum Polres Berau, Iptu Multahadi Adam, menjelaskan, wajah pelaku selalu tertutup helm dan masker.

Petunjuk utama justru berasal dari potongan visual jaket, celana, serta kendaraan Honda Beat Street yang digu-

nakan.

Polisi mencatat perubahan mencurigakan pada batok motor yang awalnya berwarna hijau kemudian berubah menjadi hitam.

Selama beringgung-minggu, petugas menyisir jalanan hanya bebekal ingatan visual dari rekaman CCTV. Hingga akhirnya, seorang anggota melihat motor serupa melintas membawa galon air, yang juga dilaporkan hilang di salah satu TKP.

Meski telah tertangkap, MR bukan lawan yang mudah bagi penyidik. Ia dikenal tidak kooperatif dan cenderung bungkam terkait lokasi penjualan barang curiannya.

Pelaku hanya bersedia mengakui perbuatannya jika polisi menyodorkan bukti rekaman CCTV yang tidak bisa dibantah.

"Kalau tidak ada CCTV, dia tidak mau mengaku. Harus benar-benar kami buktikan, baru dia mengakui," jelas Adam.

Selain mengamankan tabung gas, polisi juga meny-



**AKP JODY RAHMAN**  
Kasat Reskrim Polres Berau

Saat ini pelaku sudah ditahan untuk proses penyelidikan lebih lanjut"

ita berbagai peralatan berat seperti mesin las, gergaji, dan chainsaw.

Alat-alat tersebut diduga digunakan pelaku untuk merusak gembok dan masuk ke pekarangan rumah korban pada dini hari.

Aksi nekat MR ini diduga kuat menasar sembilan lokasi berbeda di berbagai kecamatan. Polisi kini masih terus memburu sisa barang bukti yang telah dijual oleh pelaku.

Atas perbuatannya, residivis kambuhan ini dijerat dengan Pasal 476 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan.

Hukuman maksimal sembilan tahun penjara kini menanti MR di pengadilan. Pihak kepolisian pun mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan di lingkungan pemukiman.

Sinergi antara kewaspadaan warga dan teknologi CCTV terbukti ampuh dalam meringkus pelaku kriminal yang licin. **(HENDRA IRAWAN)**





# SPORT CENTER JADI JAWABAN

## Keterbatasan Fasilitas Olahraga Berau



**KOMITE** Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Berau terus memacu langkah untuk meningkatkan kualitas olahraga daerah.

Salah satu fokus utama yang kini diperjuangkan ada-

lah penyediaan fasilitas olahraga modern demi menciptakan kenyamanan atlet saat berlatih sekaligus mendukung lahirnya prestasi.

Ketua KONI Berau, Taupan Madjid, mengatakan, berbagai program pengembangan olahraga telah disusun.

Namun, realisasinya masih terkendala keterbatasan anggaran daerah.

Dengan total 63 cabang olahraga (cabor) yang aktif, kebutuhan pembinaan dan sarana prasarana dinilai cukup besar.

"Kami memiliki banyak program untuk kemajuan olahraga. Tapi kondisi keuangan daerah saat ini belum memungkinkan mengakomodasi seluruh kebutuhan dari 63 cabor," ujarnya, Jumat (17/4/2026).

Meski dihadapkan pada keterbatasan tersebut, Taupan memastikan, peningkatan fasilitas tetap menjadi prioritas.

Menurutnya, tanpa dukun-

gan sarana yang memadai, proses pembinaan atlet tidak akan berjalan optimal.

Kabar baiknya, Pemerintah Kabupaten Berau mulai merealisasikan pembangunan sport center tahun ini.

Langkah tersebut mendapat apresiasi dari KONI Berau karena dinilai sebagai kebutuhan mendesak bagi kemajuan olahraga di Bumi Batiakkal.

"Kami sangat mengapresiasi pembangunan sport center ini. Ini menjadi jawaban atas kebutuhan fasilitas olahraga yang representatif di Berau," ungkapnya.

Pembangunan sport center tersebut merupakan revisi dari rencana sebelumnya, yakni pada saat pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) belum sempat terealisasi.

Kehadiran fasilitas ini diyakini mampu mengatasi berbagai kendala, terutama keterbatasan kapasitas GOR Pemuda Tanjung Redeb, yang

selama ini menjadi pusat kegiatan olahraga.

Taupan menjelaskan, saat event besar digelar, GOR Pemuda kerap tidak mampu menampung penonton.

Kondisi itu tak jarang memicu ketidaknyamanan hingga berpotensi menimbulkan keriuhan.

"Kalau event besar, kapasitas GOR Pemuda sering tidak mencukupi. Ini yang ingin kita benahi lewat pembangunan fasilitas yang lebih layak," jelasnya.

Besar harapannya pembangunan sport center dapat dilakukan dengan skema multiyears atau tahun jamak.

Mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan, skema tersebut dinilai lebih realistis untuk mewujudkan fasilitas olahraga berstandar.

"Kalau hanya mengandalkan satu tahun anggaran tentu berat. Multiyears jadi solusi agar pembangunan bisa maksimal," pungkasnya. **(HENDRA IRAWAN)**



**TAUPAN MADJID**  
Ketua KONI Berau

Kami memiliki banyak program untuk kemajuan olahraga. Tapi kondisi keuangan daerah saat ini belum memungkinkan mengakomodasi seluruh kebutuhan dari 63 cabor"

## Destinasi Baru Kampung Buyung-Buyung

# SAWAH 1.000 HEKTARE JADI AGROWISATA

**D**INAS Kebudayaan dan Pariwisata Berau tengah mempersiapkan kehadiran destinasi wisata baru yang mengusung konsep agrowisata berbasis pertanian.

Destinasi yang berlokasi di Kampung Buyung-buyung, Kecamatan Tabalar, ini memanfaatkan potensi lahan persawahan yang luasnya mencapai 1.000 hektare.

Selain menjadi daya tarik wisata, pengembangan kawasan ini diharapkan mampu mendukung peningkatan produksi beras lokal.

Sebagai langkah awal, pemerintah telah membangun infrastruktur pendukung berupa jalur lintasan atau tracking di area persawahan tersebut.

"Sementara memang kita sudah bangun tracking ya, tracking untuk wisata sawah Buyung-Buyung, kita pengen Buyung-Buyung itu menjadi salah satu agrowisata," ungkap Sekretaris Disbudpar Berau, Samsiah Nawir.

Agrowisata ini dirancang tidak hanya sebagai tempat

melepas penat, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi para pengunjung.

Wisatawan nantinya dapat belajar langsung mengenai proses penanaman padi, teknik memanen, serta berbagai hal teknis lainnya yang berkaitan dengan ekosistem sawah.

Meski perencanaan telah matang, tantangan saat ini terletak pada belum aktifnya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Kampung Buyung-Buyung.

Menanggapi hal itu, Disbudpar Berau menjadwalkan kunjungan dalam waktu dekat untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan intensif.

"Nanti dalam waktu dekat kita juga akan berkunjung ke Buyung-Buyung untuk mensosialisasikan lagi pembinaan terhadap pokdarwis, apakah butuh restruktur atau seperti apa sehingga ini bisa berjalan," jelasnya.

Meski belum dibuka secara resmi, pesona hamparan sawah hijau di Buyung-Buyung sudah mulai menarik perhatian

masyarakat.

Beberapa pengunjung terpantau mulai berdatangan untuk sekadar berswafoto dengan latar pemandangan alam yang segar.

Hal ini menjadi indikator bahwa minat wisatawan terhadap destinasi ini cukup tinggi.

Pihak dinas mengakui, saat ini fokus utama adalah melengkapi fasilitas penunjang atau amenities sebelum melakukan peluncuran resmi.

"Tinggal kapan nih mau kita launching. Tapi memang untuk Buyung-Buyung sendiri perlu penambahan amenities," tambahnya.

Staf Teknis sekaligus Pengawas Kepariwisata Disbudpar Berau, Andi Nursyamsi, menambahkan, proyek pengembangan wisata di Kampung Buyung-Buyung memang belum sepenuhnya rampung.

Ia berharap ketersediaan anggaran tahun ini dapat mendukung penyelesaian fasilitas yang masih kurang.

Proses pembangunan fisik di lapangan masih terus dipan-



**SAMSIAH NAWIR**  
Sekretaris Disbudpar Berau

Sementara memang kita sudah bangun tracking ya, tracking untuk wisata sawah Buyung-Buyung, kita pengen Buyung-Buyung itu menjadi salah satu agrowisata"

tau agar saat diresmikan nanti, destinasi ini sudah benar-benar siap melayani pengunjung dengan standar yang baik.

"Itu memang belum selesai. Mudah-mudahan lah kalau tahun ini ada anggaran bisa dilanjutkan," pungkasnya. (ADRIKNI SHOLIKHATI)



**Berau Terkini**  
tak berhenti

#### DIREKSI

**Komisaris** : M. Syaifuddin Zuhrie  
**Direktur** : Rengkuh Enggalingtyaz, **Digital Marketing Manager** : Aidil Anugrah, **Ikhtan** : Siti Nur Ariska, **Admin** : Tariska Ramadayani

**Advokat & Konsultan Hukum** : Firma Hukum H.A.M & Partner

**Email Redaksi** : berauterkini2023@gmail.com, **Ikhtan dan informasi** : berauterkini2023@gmail.com  
**Alamat Redaksi** : Ruko Komplek Perumahan Berau Indah, **Telepon** : 0851-6366-0045

#### SUSUNAN REDAKSI

**Penanggung Jawab/Pimpinan Redaksi** : Robithoh Johan Palupi,  
**Koordinator Liputan** : Rusdiyono, **Editor** : Maulana Ilhami Fawdi, **Reporter** : Sulaiman, Hendra Irawan, Dini Diva, Adrikti Sholikhati, **Grasis** : Surya Adji Permana, **Media Sosial** : Siti Nur Ariska, **IT & Web Development** : Fathurrohman.